

HUBUNGAN MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DENGAN PEMIKIRAN KEAGAMAAN DAN SIKAP POLITIK UMMAT ISLAM

Asfiati

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidempuan
E-mail: asfiati@yahoo.co.id

Abstrak

Perubahan pendidikan bersumber dari pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan Islam baik dari Nusantara hingga dunia Islam internasional. Perubahan pendidikan juga bersumber dari sikap politik dalam memberikan konfirmasi aktif demi kemajuan pendidikan. Manusia, pendidikan dan agama merupakan serangkaian komponen kehidupan yang mampu mewarnai khasanah pembaharuan yang dikenal dengan istilah modernisasi. Sikap politik umat Islam Indonesia menunjukkan adanya keinginan untuk mengembangkan paham-paham keagamaan dalam partai Islam dan partai umum yang memperhatikan budaya Islam. Pendidikan dan pemikiran keagamaan ikut membentuk sikap dalam berbuat dan bertindak. Masyarakat yang berafiliasi, berpendidikan dan berbudaya berupaya melakukan modernisasi pemahaman baru yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Pemahaman keagamaan sebagai hasil dari *resource* modernisasi pendidikan diharapkan mampu mengakomodir sikap politik umat Islam.

Abstract

Educational change comes from the thoughts of Islamic education leaders both from the archipelago to the Islamic world of international. Educational change also comes from a political stance in providing active confirmation for the advancement of education. Human, educational and religious life is a series of components that could color the repertoire of renewal known as modernization. The political attitudes of Indonesian Muslims demonstrated their desire to develop religious ideas within the Islamic party and the party of public attention to Islamic culture. Educational and religious thought helped shape attitudes in the act and act. Affiliated society, educated and cultured seeks to modernize the new insights that are better suited to current conditions. Religious understanding as a result of resource modernization of education is expected to accommodate the political attitudes of Muslims.

Kata Kunci: Pendidikan, Pemikiran, dan Politik

Pendahuluan

Perubahan masyarakat dalam era-globalisasi sekarang ini telah memberikan arah terhadap perkembangan dunia pendidikan. Berdasarkan kajian sejarah dunia pendidikan memberikan pembaharuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan masyarakat, sehingga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, mampu melakukan filter dengan etika dan norma-norma agama Islam. Aspek-aspek perubahan dalam masyarakat memberikan pengaruh terhadap modernisasi, sehingga dapat dijadikan tolak ukur atas kemajuan pendidikan Islam.

Perubahan pendidikan bersumber dari pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan Islam, baik dari Nusantara hingga dunia Islam internasional, serta sikap politik dalam memberikan konfirmasi aktif demi kemajuan pendidikan. Konfirmasi terhadap dunia pendidikan merupakan kondisi riil yang dijalankan oleh masyarakat pendidikan dalam menjalankan aktivitas. Pendidikan pada intinya melibatkan manusia dalam menjalankan aktivitas keseharian dalam kemajuan dan pembaharuan. Banyak cara yang dilakukan manusia dalam hal menyikapi aktivitas, sehingga pembaruan dapat dimunculkan. Cara itu sendiri mampu mengarahkan pemikiran dan menformat sikap. Dalam hal ini manusia melibatkan agama sebagai kompas untuk mengarahkan jalan kerja aktivitas manusia di lembaga pendidikan.

Manusia, pendidikan dan agama merupakan serangkaian komponen kehidupan mampu mewarnai khasanah pembaharuan yang dikenal dengan istilah modernisasi. Pada saat agama mempengaruhi kehidupan seseorang, di saat yang sama corak pemikiran keagamaan berimplikasi terhadap masyarakatnya. Pendidikan dan pemikiran keagamaan ikut membentuk sikap. Dalam hal ini melalui pendidikan berupaya melakukan modernisasi guna mengembrio pemikiran keagamaan yang diharapkan dapat direalisasikan terciptanya sikap politik ummat Islam. Realisasi dari sikap politik tersebut memunculkan modernisasi pendidikan Islam secara nasional ataupun internasional.

Mengingatn proses modernisasi pendidikan hanya sebagai alat/instrumen untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran modern. Pemikiran-pemikiran keagamaan seperti pemikiran Muhammad Abduh, Harun Nasution, juga gagasan-gagasan modernisasi Muhammadiyah dan lainnya. Dalam perkembangannya, pendidikan dan pemikiran keagamaan ikut membentuk sikap dan perilaku, hingga sikap dalam berbuat dan bertindak dapat terarah sebagaimana mestinya. Kebebasan berbuat dan bertindak diwarnai dengan tata cara dan arahan yang berlaku pada sekelompok manusia. Demikian halnya pada masyarakat yang berafiliasi, berpendidikan dan berbudaya berupaya melakukan modernisasi kepada pemahaman baru yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang (modern). Kebutuhan akan pemahaman baru muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban dunia pada umumnya dan peradaban Islam pada khususnya.¹

Kondisi pembaharuan diharapkan mampu menimbulkan kontak dengan hal-hal baru mulai dari budaya, bahasa, sikap, pemikiran, kebiasaan, perilaku, pendidikan, politik, bahkan agama. Perilaku manusia identik dengan nuansa serta khasanah perkembangannya. Dalam hal ini khasanah yang dimaksud ada kalanya berimplikasi kepada sikap politik, yang merupakan bagian dari perilaku manusia. Corak pemikiran keagamaan seseorang dalam batas tertentu mempengaruhi sikap politiknya. Signifikansi corak pemikiran keagamaan terlihat dalam afiliasi dan saluran politik seseorang.

Adanya hubungan kuat antara manusia, pendidikan dan agama, menyebabkan manusia disebut sebagai *homo religious* dan *homo educandum*. *Homo religious* adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati *sakralitas* yang ada dan tampak pada alam semesta. *Homo educandum* adalah makhluk yang memerlukan pendidikan. Manusia dipandang sebagai *homo educandum* yaitu makhluk yang harus dididik, karena tanpa pendidikan, pewarisan kebudayaan dan pengembangan potensi manusia

¹Hasan Asari, *Modernisasi Islam Tokoh, Gagasan dan Gerakan Kajian tentang Perkembangan Moderen dalam Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 2.

tak dapat dilakukan dengan sepenuhnya. Proses pewarisan budaya dan pengembangan potensi merupakan proses perubahan atau modernisasi. Dalam melakukan proses tersebut dilalui dengan pengalaman-pengalaman.

Pengalaman menelusuri penghayatan yang suci atau realitas mutlak (*ultimate reality*) sehingga mempengaruhi, membentuk dan ikut menentukan corak hidup. Membicarakan hubungan nilai-nilai agama dengan perilaku politik, tampaknya, sejalan dengan penelitian Weber tentang pengaruh nilai-nilai agama terhadap perilaku politik. Dalam bukunya yang terkenal, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*² Weber berusaha menjelaskan mengapa kapitalisme modern berkembang di Eropa Barat dan Amerika, dan tidak berkembang di wilayah lainnya. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa suatu kegiatan unik yang bersifat keagamaan, yaitu reformasi Protestan (*Calvinisme*), telah melahirkan nilai-nilai baru secara mendasar, yang memberikan pengesahan kepada usaha-usaha yang bercorak ekonomi.³

Agama diakui telah memperjelas nilai-nilai dan norma-norma kehidupan daripada aspek apapun dalam masyarakat. Artinya agama merupakan salah satu di antara sumber nilai yang penting, yang menunjang budaya politik masyarakat. Agama lahir dari peradaban, peradaban terwujud dengan kondisi pendidikan yang melakukan perubahan, sehingga ada hubungan modernisasi pendidikan dengan pemikiran keagamaan yang direalisasikan terciptanya sikap politik ummat Islam.

Tulisan ini menelusuri hubungan modernisasi pendidikan Islam dengan pemikiran keagamaan dan sikap politik ummat Islam antara agama dan perilaku politik seseorang. Apakah memang ada hubungan perubahan-perubahan pendidikan yang dipelopori banyak tokoh pendidikan Islam, sehingga pemikiran keagamaan mengalami perkembangan atau nuansa perubahan sesuai dengan zamannya hingga mampu memberikan kontribusi pada sikap politik ummat Islam itu sendiri.

²Sastrapratedja (ed.), *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 382.

³Ajat Sudrajat, *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1-11.

Modernisasi Pendidikan Islam

Pendidikan mengalami dinamisasi dan mengikuti dinamika masyarakat. Pendidikan pada suatu masyarakat mutlak harus terus diperbaharui. Pembaharuan di bidang lembaga, sistem, kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran, manajemen, kepemimpinan, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Modernisasi pendidikan di dunia Islam banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti: Muhammad Ali Pasya di Mesir. Muhammad Ali Pasya memodernisasikan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah modern dan memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains tersebut ke dalam kurikulumnya.⁴

Rifa'ah al Tahtawi, ide pendidikannya banyak dikemukakan dalam bukunya "*al-Mursyid al-Amin fi al-Banat wa al-Banin* (Petunjuk bagi Pendidikan Putra dan Putri), yang menurutnya pendidikan dasar harus bersifat universal dan merupakan hak yang sama bagi semua tingkat kehidupan masyarakat.⁵

Muhammad Abduh mengadakan modernisasi pendidikan yakni dengan merombak sistem dualisme pendidikan. Menurutnya di sekolah-sekolah umum harus diajarkan agama, sedangkan di sekolah-sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern.⁶

Selanjutnya Muhammad Rasyid Ridho mengadakan ide pembaharuan dalam bidang pendidikan, terutama dalam bidang kurikulum. Aspek kurikulum mampu menandingi daya tarik sekolah-sekolah Kristen, di samping menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern di kalangan umat Islam sekaligus memberikan informasi yang benar tentang Islam.⁷

Banyak lagi tokoh Islam yang berbicara tentang modernisasi pendidikan Islam, namun keempat tokoh tersebut mewakili pembahasan

⁴Abdul Mukti, *Pembaharuan Lembaga Pendidikan di Mesir* (Bandung: Cita Pustaka, 2008), hlm. 74.

⁵Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 75

⁶Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 7.

⁷Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 3.

tulisan ini dalam menyikapi hubungan modernisasi pendidikan Islam dengan pemikiran keagamaan dengan sikap politik ummat Islam.

Pada intinya modernisasi pendidikan Islam berusaha untuk mencari paradigma baru pendidikan Islam. Pemikiran untuk mencari paradigma baru pendidikan itu bersifat *reaktif* dan *defensif*, untuk menjawab dan membela kebenaran setelah adanya tantangan.⁸

Upaya modernisasi pendidikan Islam itu selain mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategi yang *a-proaktif* dan *antisipatif*, mendahului perkembangan masalah yang akan hadir di masa mendatang, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada mulanya semua pendidikan Islam adalah tanggung jawab perseorangan.⁹ Beranjak dari pernyataan ini modernisasi pendidikan Islam dapat kita lihat dari perkembangannya sebagai berikut:

Tabel 1
Modernisasi Pendidikan Islam

No	Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah	Aspek-Aspek yang Mengalami Modernisasi Pendidikan Islam
1	Masa Rasulullah	a. Prinsip dan Sistem Pendidikan Islam: sejak wahyu pertama Iqra' Pendidikan Islam memasuki Sejarah.
		b. Guru: Rasulullah dan juru dakwah adalah guru: Rasulullah memerintahkan setiap mukmin pandai tulis baca.
		c. Mesjid berkembang jadi Kuttab merupakan sekolah yang pertama dalam sejarah Islam.
		d. Materi pendidikan bertambah dari Aqidah hingga berenang.

⁸Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 3.

⁹Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1985), hlm. 146.

No	Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah	Aspek-Aspek yang Mengalami Modernisasi Pendidikan Islam
2.	Abad Ke 4 H(10 M) timbullah gerakan Ihwanussafa'	<p>a. Pendidikan: memadukan tradisi Islam dan filsafat Yunani</p> <p>b. Negara ikut campur tangan terhadap masalah pendidikan</p> <p>c. Sekolah: berdiri Al-Azhar untuk menyebarkan mazhab Syiah saat kerajaan Fathimiyah berjaya.; Masa Abbasyiah berdiri al-Madrasah an-Nizamiah untuk menyebarkan mazhab ahlisunnah</p> <p>d. Guru yang terkenal: al-Ghazali</p> <p>e. Buku: Ihya Ulumuddin</p>
3.	Pertengahan abad 19 Lahirlah pemikir-pemikir Islam	
3.1.	Muhammad Ali	<p>a. Usaha dalam bidang pendidikan yaitu mendirikan Lembaga Kementerian Pendidikan: lembaga pendidikan pertama: sekolah militer, teknik, kedokteran, obat-obatan, pertambangan, pertanian, penerjemahan</p> <p>b. Guru: mengajarkan ilmu-ilmu baru dan mendatangkan guru dari Eropa.</p> <p>c. PBM: dengan sistem ganda</p> <p>d. Materi: mengadakan gerakan penerjemahan buku-buku Eropa</p>

No	Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah	Aspek-Aspek Yang Mengalami Modernisasi Pendidikan Islam
3.2.	Rifa'ah al-Tahlawi	a. bukunya " <i>al-Mursyid al-Amin fi al-Banat wa al-Banin</i> (Petunjuk bagi Pendidikan Putra dan Putri), menurutnya pendidikan dasar harus bersifat universal dan merupakan hak yang sama bagi semua tingkat kehidupan masyarakat.
3.3.	Muhammad Abduh	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pendidikan: dualisme: sekolah umum harus diajarkan agama dan sekolah agama diajarkan ilmu pengetahuan modern. b. Honor guru dibayar dengan layak. c. Asrama dikembangkan. d. Pembinaan administrasi pendidikan. e. Ada pegawai untuk kelancaran administrasi pendidikan. f. Kalender pendidikan: masa efektif belajar yang panjang, dengan memperpendek masa libur. g. Pokok-pokok Matapelajaran dalam bahasa yang sudah dimengerti. h. Perpustakaan dibenahi. i. Materi pelajaran tentang: teologi Islam, retorika, logika dan tafsir. Kurikulum berkembang yaitu adanya matapelajaran: Matematika, Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu bumi. j. PT (al-Azhar sebagai pusat pembaharuan untuk dunia Islam)

No	Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah	Aspek-Aspek Yang Mengalami Modernisasi Pendidikan Islam
3.4.	Muhammad Rasyid Ridha	a. Kurikulum mencakup: Teologi, Moral, Sosiologi, Ilmu Bumi, Sejarah, Ekonomi, Hitung, Kesehatan, Bahasa Asing, Ilmu Mengatur Rumah Tangga, Tafsir, Hadits.
4.	Priode Modern	
4.1.	Hasan al Banna	a. Sistem Pendidikan: Pendidikan Islam b. Kurikulum: pelajaran agama diberikan kepada sekolah pemerintah, agama dan umum. c. Lingkungan pendidikan: Formal sekolah dan juga mementingkan informal lingkungan keluarga.
5.	Kalangan Arab Kristen:	
5.1.	Batrus al-Bustani	a. Menyatukan sistem pendidikan dan pengajaran b. Merintis sekolah untuk semua penduduk dari agama apapun c. Tujuan pendidikan: berorientasi kepada pengukuran tali cinta dan kerukunan antar semua unsur masyarakat dan meniadakan sebab-sebab timbulnya fanatisme dan permusuhan.

Modernisasi pendidikan Islam merembes ke Indonesia sejalan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Berdasarkan masuknya ide-ide pembaharuan, baik dari pengaruh datangnya dari Mesir ataupun dari

paham Muhammad Abduh yang dikenal melalui majalah-majalah, di awal abad ke-20 muncullah ide-ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.

Perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga saat sekarang ini telah melalui tiga periodisasi. *Pertama*, periode awal sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, dayah, surau atau mesjid dengan titik fokus adalah ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. *Periode kedua*, dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20 ditandai dengan lahirnya madrasah, dan juga telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam program kurikulum, serta telah mengadopsi sistem pendidikan modern, seperti metode, manajerial, klasikal, dan lain sebagainya. *Periode ketiga*, pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam Sistem Pendidikan Nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dilengkapi dengan beberapa Peraturan Pemerintah, dan diperkuat pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka jelaslah bahwa pendidikan di Indonesia telah diatur oleh satu peraturan yang telah disepakati.

Tabel 2

Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia

No	Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah	Aspek-Aspek Yang Mengalami Modernisasi Pendidikan Islam
1	Pendidikan Islam pada Masa Peralihan (1900-1908)	a. Banyak berdiri tempat pendidikan Islam terkenal di Sumatera, seperti: Surau Parabek Bukit Tinggi (1908) didirikan oleh Syeckh H. Ibrahim Parabek dan di Pulau Jawa Pesantren Tebuireng. ¹⁰

¹⁰Sidi Ibrahim Buchari, *Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau* (Jakarta: Gunung Tiga, 1981), hlm. 62.

No	Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah	Aspek-Aspek Yang Mengalami Modernisasi Pendidikan Islam
		b. Buku pelajaran semuanya karangan ulama Islam Kuno dan dalam Bahasa Arab. ¹¹
2.	Pendidikan Islam Sesudah Tahun 1909-1930	Sistem pendidikan memberikan pelajaran agama di madrasah atau sekolah secara teratur. ¹²
3.	Pendidikan Islam Tahun 1940	<p>Sikap Jepang terhadap pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman Belanda. Jepang memberikan pengaruh pada pendidikan Islam sebagai berikut:</p> <p><i>Pertama</i>, umat Islam merasa lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikannya, karena berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang sangat diskriminatif dan membatasi tidak diberlakukan lagi. Umat Islam pada zaman Jepang memperoleh peluang yang memungkinkan dapat berkiprah lebih leluasa di bidang pendidikan.</p> <p><i>Kedua</i>, bahwa sistem pendidikan Islam di samping sistem pendidikan Pesantren yang didirikan oleh kaum</p>

¹¹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), hlm. 62.

¹²Haidar Putra Daulay & Nurgaya Pasha, *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah Kajian dari Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 172.

No.	Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah	Aspek-Aspek Yang Mengalami Modernisasi Pendidikan Islam
		ulama tradisional, juga terdapat system pendidikan klasikal sebagaimana yang terlihat pada madrasah. ¹³
	Pendidikan Islam Tahun 1945-1965	Setelah Indonesia merdeka penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah baik di sekolah negeri maupun swasta. Departemen Agama khusus mengelola pendidikan agama di bawah sekolah-sekolah umum dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB).
	Pendidikan Islam Tahun 1965 hingga 1999	Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara. Dengan berlakunya Undang-Undang serta pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia keberadaan pendidikan Islam pun mendapat peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan.

Ide-ide pembaharuan memasuki dunia pendidikan karena banyaknya orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari al-Qur'an dan studi Islam. Pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada awal abad ke-20 berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi isi maupun metode.¹⁴

¹³Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.309.

¹⁴Karel Stebrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 27-28.

Gerakan pembaharuan Islam merupakan jembatan yang menjadi media transmisi gagasan modern dalam pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia. Pembaharuan pendidikan Islam mempunyai hubungan yang erat dengan pemikiran keagamaan. Pemikiran dalam Islam mengajak manusia dalam memahami ajaran agama. Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya organisasi-organisasi masyarakat dan politik. Terbukti sebagian besar pemikiran Islam terlahir dari organisasi-organisasi yang ada, dilanjutkan dengan aktifitas-aktifitas keagamaan yang mengarah kepada islamisasi budaya dan politik secara massal. Peranannya bagi arah pemikiran Islam di Indonesia akan ditemukan akar modernisasi Islam di Indonesia. Islam akan mampu memberi corak pertumbuhan dan perkembangan pemikiran masyarakat Islam yang berwawasan moral. Asalkan Islam dipahami secara benar dan realistis, tidak diragukan lagi akan berpotensi dan berpeluang besar untuk ditawarkan sebagai pilar-pilar peradaban alternatif di masa depan.

Pemikiran Keagamaan

Perbedaan corak pemikiran dalam Islam adalah salah satu penyebab terpolarisasinya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, antara lain berkenaan dengan corak pemikiran atau pemahaman dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan. Bagi Muhammad Abduh misalnya, Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal.¹⁵ Pemikiran rasional baginya adalah jalan untuk memperoleh iman yang sejati. Penggunaan akal yang dominan dan anjurannya untuk langsung memahaminya dari al-Quran dan al-Sunnah, menjadikan ijtihad sebagai alat utama dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan. Bentuk pemikiran yang kaku dalam melakukan penafsiran menempatkan agama di atas negara atau kekuasaan politik. Pemikiran ini merupakan pengaruh dari paham zuhud; di India oleh Akhmad Khan, di mana menganggap dunia tidak perlu (paham zuhud harus dinisbahkan), paham *tawaqqal*/menyerah diri dan paham *fatalism*/jabariah

¹⁵Harun Nasution, *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 453.

dipaksakan. Paham *tawaqqal* tidak sesuai dengan Islam. Akhirnya dikenal dengan paham qoda dan qodar oleh Muhammad Abduh, dunia menyatakan manusia melakukan pilihan. Pola pemikiran ini melahirkan ide modernisasi dari *gemenshelf* (*primordial*) kepada *geselshelf* (prestasi perjuangan). Dari pola yang sifat turun temurun yang digaungkan Ibnu Khaldun hingga sesuatu yang harus dikontrakkan.

Paham dan pemikiran ini merembes di Nusantara. Pada masa awal Islam di kepulauan Nusantara, ummat Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu ummat Islam yang mengikuti aliran Syi'ah dan ummat Islam yang mengikuti aliran Ahl al-Sunnah.¹⁶

Perjumpaan dua aliran tersebut ternyata menimbulkan persaingan dalam mempengaruhi pemimpin negara dan kalau mungkin merebut kekuasaan. Dalam catatan sejarah permusuhan pengikut aliran Syi'ah dan Ahl al-Sunnah dilatarbelakangi oleh politik kemudian berkembang ke ranah akidah, tarekat, filsafat dan tasawuf.¹⁷ Karena itu pertentangan tersebut tampak kompleks sekali sehingga terus bermunculan dalam beberapa periode yang sulit didamaikan.

Dalam perkembangannya, ummat Islam Nusantara didominasi pengikut aliran Ahl al-Sunnah, baik yang Asy'ariyah maupun Maturidiyah, tetapi mayoritas pengikut Al-Asy'ari. Dalam praktik sehari-hari, sebenarnya ummat Islam Nusantara tidak murni mengikuti Al-Asy'ari sebagai representasi aliran Ahl al-Sunnah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap paham Ahl al-Sunnah; kurangnya kesadaran terhadap konsekwensi-konsekwensi dari paham-paham yang bermunculan.

Pada dekade 1930-an gerakan Islam cenderung mengalami dinamika. Basis sosial Islam ketika itu nyaris terpolarisasi pada dua aliran trend, yaitu tradisionalis yang diwakili Nahdlatul Ulama (NU) dan aliran modernis yang diwakili Muhammadiyah.¹⁸

¹⁶Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 37.

¹⁷A.Hasjmy, *Syiah dan Ahlussunnah: Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 46-50.

¹⁸Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Intrepetasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 198.

Hampir semua organisasi Islam mengklaim dirinya sebagai Ahl al-Sunnah, baik secara legal formal dinyatakan oleh institusinya, keputusannya maupun pengakuan tokohnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara teologis, paham keagamaan mayoritas masyarakat muslim Indonesia adalah Ahl al-Sunnah. Tetapi mereka berbeda-beda dalam memaknai, menafsirkan dan menerjemahkan Ahl al-Sunnah itu dalam konteks aplikasi kehidupan keagamaan sehari-hari. Tidak jarang terjadi pertentangan di antara mereka dalam persoalan yang kecil-kecil *furu'iyah* akibat *khilafiyah* (perbedaan pandangan).

Pada 1970-an terdapat gelombang baru yang sengaja diciptakan. Harun Nasution mengenalkan dan mempopulerkan gagasan teologi rasional ala Mu'tazilah di Indonesia.¹⁹ Semangatnya mengenalkan teologi ini menyebabkan Harun Nasution sering disebut sebagai neo-Mu'tazilah. Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang disosialisasikan Nasution untuk membangkitkan semangat umat Islam Indonesia dapat diterima oleh dosen maupun mahasiswa IAIN. Dosen-dosen yang berpengaruh, baik di UIN, IAIN, maupun STAIN di Indonesia ini, banyak sekali mendapatkan pengaruh dari pemikiran Mu'tazilah dari Nasution.

Seiring dengan arus modernisasi umat Islam Indonesia mulai bergeser. Mereka mulai sedikit demi sedikit tetapi pasti berupaya untuk mengurangi fanatisme. Islam Indonesia adalah Islam *inklusif* dan nonsektarian, sehingga mereka responsif terhadap pemikiran dari luar. Islam bersifat *inklusif* yaitu suatu definisi yang dinamakan oleh penganut konsepsi tentang sistem sosial yang menekankan perlunya individu-individu dalam masyarakat dikontrol oleh kesetiaan menyeluruh kepada seperangkat sentral kepercayaan dan nilai.²⁰

Demikianlah paham keagamaan Islam Indonesia, dari paham tersebut ditarik garis lurus yaitu garis moderasi yang mampu menjembatani dua kubu pemahaman yang perlu ditelusuri untuk mengungkapkan

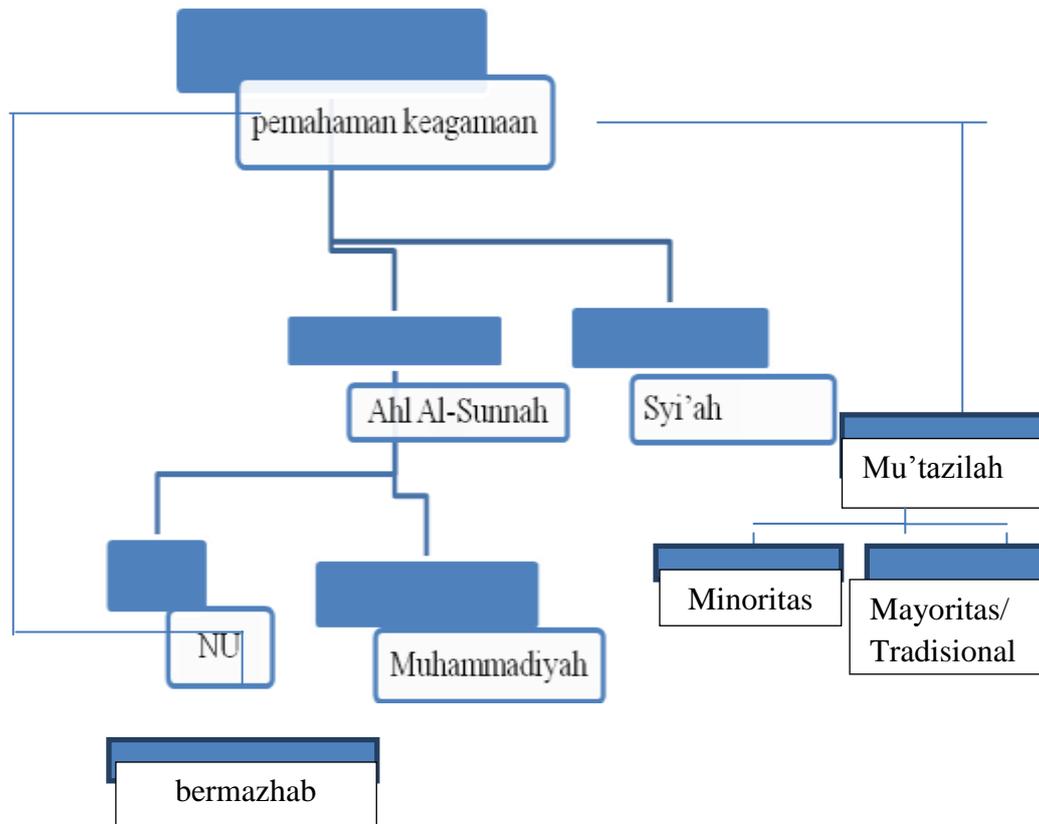
¹⁹Fuad Jabali dan Jamhari (peny), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. ix.

²⁰Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 163.

karakteristiknya. Berikut dapat diilustrasikan pemahaman keagamaan dalam skema pada gambar I ini.

Gambar I

Perkembangan Pemahaman Keagamaan



Jika dikaladeiskopkan tentang sejarah perkembangan keagamaan ini berpengaruh terhadap sikap politik umat Islam. Sifat politik dalam kondisi perkembangan pendidikan dapat dilihat sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia. Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang *dualistis*, yaitu: (1) Sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah umum yang sekuler, dan (2) Sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri.

- 1). Pengembangan pemikiran pendidikan Islam pada periode sebelum Indonesia merdeka (1900–1945) terdapat berbagai corak pemikiran pengembangan pendidikan Islam corak lama, antara lain:
 - a. *Isolatif Tradisional* (corak pendidikan pondok pesantren). Dalam arti tidak mau menerima apa saja yang berbau kolonial (barat). Pendidikan Islam pada pondok pesantren (1900-1908) meliputi: (1) Pengajian al-Qur'an, dan (2) Pengajian kitab-kitab yang telah ditetapkan oleh kiai.
 - b. *Sintesis* (pertemuan corak lama dan corak baru), yang berwujud madrasah. Corak sintesis ini mengandung beberapa variasi, antara lain: a). Pola pendidikan madrasah dengan format barat, terutama dalam sistem pengajarannya, tetapi isi pendidikan tetap lebih menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam, seperti Madrasah Sumatera Thawalib (surau yang pertama yang memakai sistem kelas) yang didirikan tahun 1921 M, oleh Syeh Abd. Karim Amrullah, ayahnya Hamka, dan Madrasah Tebu Ireng, pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1919 M.
 - c. Pola pendidikan madrasah yang mengutamakan ilmu agama, tetapi secara terbatas matapelajaran umum juga diberikan, seperti madrasah Diniyah Zaenuddin Lebay (1915 M) di Padang Panjang, dan Madrasah Salafiyah Tebu Ireng, pimpinan K.H. Ilyas (1929 M) Pola pendidikan madrasah yang menggabungkan secara seimbang antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, seperti: Pondok Muhammadiyah, oleh K.H. Ahmad Dahlan (1912 M). Pola pendidikan madrasah yang mengikuti pola barat ditambah beberapa matapelajaran agama, seperti: Madrasah Adabiyah (1909 M), didirikan oleh Syeh Abd. Ahmad.
- 2). Pengembangan pemikiran pendidikan Islam pada periode Indonesia merdeka (1945–sekarang).

Wacana yang berkembang dengan proses terwujudnya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional menyoroti persoalan dalam pengembangan pemikiran pendidikan Islam Indonesia, sebagai berikut:

- a). Dikotomi ilmu pengetahuan.
- b). Kualitas pendidikan Islam.

Upaya membangun pendidikan Islam secara terpadu untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pemecahan masalah tersebut, seharusnya corak pemikiran pendidikan Islam yang lama seperti:

- a. *Sintesa* (penyempurnaan) dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada
- b. Menumbangkan konsep dualisme antara ilmu agama dan ilmu umum.

Sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa Islam. Menurut Karim, menyarankan bahwa tauhid sebagai landasan filosofis pendidikan Islam.²¹ Berikut pemaparan contoh pemikiran keagamaan yang berlangsung dalam kajian sejarah pendidikan Islam Indonesia:

Tabel 3
Corak pemikiran keagamaan yang berlangsung dalam kajian sejarah pendidikan Islam Indonesia

No.	Corak pemikiran keagamaan		
	Contoh Corak Pemikiran Keagamaan Lama	Contoh Corak Pemikiran Keagamaan Baru	Contoh Corak Pemikiran Keagamaan Lama dan Baru
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Ilmu yang sudah final: Sintesa (penyempurnaan) dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada b. Menumbangkan konsep dualisme antara ilmu agama dan ilmu umum. 	<p>Terbuka: memahami al-Quran dan al-Sunnah, menjadikan ijtihad sebagai alat utama dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan.</p>	<p><i>Dikotomi ilmu pengetahuan</i>. Problem tentang dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum</p>

²¹Karim, *Al-Fikr al-Islāmiy. Cet. II* (Beirut: Dār al-Fikr, 1987, hlm.87).

No	Corak pemikiran keagamaan		
	Contoh Corak Pemikiran Keagamaan Lama	Contoh Corak Pemikiran Keagamaan Baru	Contoh Corak Pemikiran Keagamaan Lama dan Baru
2	A historis; <i>Isolatif Tradisional</i> (corak pendidikan pondok pesantren). Dalam arti tidak mau menerima apa saja yang berbau kolonial (barat).	Antropo centri; Lahir organisasi-organisasi dan dilanjutkan dengan aktifitas-aktifitas keagamaan yang mengarah kepada islamisasi budaya dan politik secara massal.	a. <i>Sintesis</i> (pertemuan corak lama dan corak baru), yang berwujud Madrasah.
3	<i>Defensif</i>	Zuhud; Sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa Islam. Paham Tawaqqal tidak sesuai dengan Islam	Dari <i>gemenshelf</i> hingga <i>geselshelf primordial</i> dan prestasi
4	<i>Refetitif</i> . Pola yang sifat turun temurun	Qoda dan qodar: dunia mengatakan manusia melakukan pilihan-pilihan	Adanya penelitian sehingga menemukan teori-teori teknologi
5	<i>Social Expection</i> : paham fatalistik	Paham zuhud harus dinisbahkan.	Negara wajib memberikan jaminan

Sikap Politik Ummat Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap politik memiliki arti yang sangat luas. Keluasan arti sikap politik bukan saja karena sikap politik merupakan sikap setiap warga negara dihadapan negara, melainkan karena sikap politik menyangkut bidang-bidang kehidupan lain yang demikian kompleks (sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan dan politik itu sendiri). Menurut Smith²² ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap politik: (1) otoritas dogmatis, atau kebenaran yang bersifat mutlak; (2) otoritas terarah, atau ketuntasan pengaturan; dan (3) pelembagaan otoritas, atau pemaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan.

Otoritas dogmatis dalam Islam sangat kuat. Kebenaran Islam diyakini mutlak, universal dan tidak dapat diubah. Wahyu al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah wahyu terakhir untuk menuntun kepentingan hidup seluruh umat manusia. Otoritas terarah, yang merupakan seperangkat aturan komprehensif yang harus ditaati oleh umat Islam, terdapat dalam syari'ah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa syari'ah lebih luas daripada sekedar sistem hukum. Syari'ah merupakan katalog komprehensif perintah-perintah dan aturan-aturan Allah untuk membimbing ummat Islam. Cakupan syari'ah begitu luas yang meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan masyarakatnya.

Pelembagaan otoritas adalah adanya hirarki kepemimpinan yang terorganisasi dalam Islam yang mengawal pelaksanaan dan berlakunya syari'ah. Dalam Islam, organisasi hirarki keagamaan seperti yang dimiliki gereja tidak ada, oleh karena itu, kelembagaan seperti ini diserahkan kepada umat atau negara. Dalam hal inilah kemudian muncul jargon politik yang dikemukakan oleh sejumlah gerakan Islam bahwa Islam adalah *al-din*

²² Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 224.

wa al-daulah.²³ Islam merupakan sistem keberadaan yang total, yang secara universal sesuai dengan semua keadaan, waktu dan tempat.

Sikap politik menurut Sudijono Sastroatmodjo ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat.²⁴ Faktor pembentuk identitas bersama itu menurut Ramlan Surbakti mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas.²⁵ Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat.

Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat. Faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keagamaan yang sama. Dengan demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk sikap politik seseorang.

Faktor personal biasanya disandarkan kepada ketokohan seseorang menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. Dalam mengekspresikan sikap politiknya, suatu masyarakat melihat sikap politik yang diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutannya. Faktor lain yang ikut membentuk sikap politik warga Negara adalah yang berupa faktor sipil. Faktor sipil ini terlihat dalam tatanan kehidupan di masyarakat berupa keadilan di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya. Terwujudnya rasa keadilan yang dirasakan seorang warga negara dalam berbagai bidang kehidupan misalnya, mendorong dirinya untuk mendukung pemerintahan yang ada. Dukungan yang diberikan kepada pemerintah ini dapat saja mengatasi (*mentransendensi*) faktor-faktor di atas. Sikap politik seseorang mendukung suatu pemerintahan bukan karena presidennya

²³Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 16.

²⁴Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 228.

²⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982), hlm. 44-47.

memiliki kesamanaan suku, agama, atau kepribadiannya melainkan lebih karena presiden itu dapat menyelenggarakan pemerintahan yang adil.

Agama dan politik (contoh kasus di Barat) secara historis penciptaan suatu identitas bersama sebagian didasarkan pada identitas agama. Sampai abad ke-19, orang belum membuat perbedaan yang tegas antara yang spiritual dan sekuler, antara yang suci dan yang fana (*profane*). Pada umumnya, nilai-nilai sakral memberikan rasa solidaritas sosial yang kuat. Dengan adanya komunitas-komunitas etnis yang relatif homogen dan munculnya negara-bangsa yang sekuler, dasar-dasar yang bercorak sakral belum juga hilang.²⁶

Hubungan antara agama yang dianut seseorang dengan kehidupan politik cenderung menunjukkan kemungkinan untuk mengikuti suatu partai.²⁷

Maksudnya pemahaman keagamaan suatu kelompok keagamaan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok keagamaan minoritas cenderung untuk mendukung partai. Dalam menjelaskan hubungan antara keanggotaan kelompok keagamaan dengan sikap politik menyebabkan corak politik beragam.²⁸ Contoh pada agama Katolik bahwa pemahaman keagamaan dengan sikap politik bahwa kenyataan orang Katolik Roma di Amerika Serikat dan Inggris cenderung memilih partai.²⁹

Corak politik ini di ranah perpolitikan Indonesia dapat dipantau dari sikap apresiatif terhadap wacana keislaman di mana wacana keislaman di Indonesia yang diwakili empat tokoh; Amien Rais, Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid dan Jalaluddin Rahmat. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya mereka telah menuangkan ide dan gagasan segarnya

²⁶Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Lukman Hakim (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 92.

²⁷Michael Argyle and Benjamin Beit-Hallahmi, *The Social Psychology of Religion* (London:Routledge & Kegan Paul, 1975), hlm. 101.

²⁸Janowitz, M. and Segal, D.R., *Social Cleavage and Party Affiliation: Germany, Great Britain, and the United States*, *American Journal of Sociology*, 72, hal. 601-618.

²⁹Anderson, C.HLM., *Religious Community Among White Protestants, Catholics, and Mormons*, *Social Forces*, 46, hlm. 501-508, dalam Michael Argyle, *The Social Psychology*, hlm. 104.

sebagai sumbangan pemikiran keislaman yang sangat berguna bagi pengembangan umat beragama di Indonesia. Lebih dari itu, mereka amat dekat dengan publik dan dunia pers. Hampir tidak ada waktu luang bagi mereka untuk menyendiri.

Mereka memiliki reputasi yang sangat tinggi, baik di kalangan bawah maupun kalangan atas. Hanya saja mereka mempunyai simplifikasi tertentu yang membuat mereka dapat berkomunikasi dengan komunitasnya. Nurcholish Madjid misalnya, ia lebih dekat dengan kaum intelektual, begitu juga Amien Rais, di samping ia memiliki basis konstuenennya di kalangan Muhammadiyah. Hal serupa juga tidak kalah reputasinya dengan ketokohan Abdurrahman Wahid dan Jaluluddin Rahmat.

Banyaknya ide pemikiran para tokoh pemikir Islam memberikan nuansa baru bagi corak pemikiran keagamaan, sebagai basis ideologi yang mereka bangun. Kebebasan berpikir yang telah menjadi kultur sehari-hari di dunia akademis, telah mengundang sebagian besar mahasiswa Islam untuk merumuskan kembali paradigma pemikiran keagamaan yang telah ada. Hampir semua sepakat bahwa paradigma pemikiran umat Islam saat ini merupakan hasil formulasi ulama klasik. Meski mengalami pembaharuan beberapa kali, tapi tidak banyak perubahan mendasar dalam paradigma pemikiran tersebut. Terlebih lagi tuntutan perubahan mengharuskan umat Islam menyusun kembali paradigma yang baru.

Pembaharuan pemikiran terjadi, wacana pemikiran Islam pun mengundang kontroversi. Misalnya saja wacana sekularisasi agama yang diungkapkan Nurcholish Madjid melalui slogannya yang terkenal "Islam Yes, Partai Islam No!". Pada pembaharuan Teologi Islam nampaknya merupakan salah satu agenda utama dari salah satu Organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Hal ini dilaksanakan dengan cara membumikan ajaran-ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Teologi bukan sekedar seperti ilmu ushuluddin gaya lama, yang hanya berkutat pada persoalan Tuhan, tapi lebih dari itu, saat ini kalangan anak muda Islam memerlukan perspektif yang lain, yaitu menginginkan suatu teologi yang relevan dengan masalah

masalah sosial yang kongkret. Ini lebih diperkenalkan oleh Amien Rais dengan istilah "tauhid sosial".

Perguruan tinggi membawa perubahan banyak terhadap pemikiran di Indonesia. Sebab, dalam sejarah kita melihat bahwa gerbong pemikiran Islam di Indonesia di mulai dari IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Syarif Hidayatullah. Tidak heran jika kemudian paham liberal Islam terlahir dari rahim IAIN (sekarang UIN). Di sinilah nampaknya menarik mengkaji perkembangan pemikiran Islam modern di Indonesia dari tubuh organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam.

Perkembangan pemikiran Islam dewasa ini telah diwarnai oleh dua jenis kutub pemikiran yang cenderung saling dihadapkan dalam memahami doktrin ajaran Islam. Kedua jenis pemikiran tersebut adalah pemikiran revivalis atau lebih dikenal dengan Islam fundamentalis di satu sisi dan Islam liberal pada sisi yang lain. Kedua jenis pemikiran tersebut telah sedemikian luas mewarnai diskursus Islam yang sering mengarah pada konflik dan ketegangan antar keduanya karena perbedaan prinsip dasar interpretasi.

Pesatnya pengaruh pemikiran yang berasal dari luar Indonesia banyak sekali membawa perubahan terhadap pola pikir budaya umat Islam di Indonesia. Seperti munculnya aliran Jaringan Islam Liberal (JIL), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan lain sebagainya. Adanya berbagai aliran ini dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kritis, yaitu kesadaran yang menolak dominasi dalam budaya keagamaan Indonesia yang cenderung sarat dengan kepentingan, tunduk pada etos konsumerisme, menopang tatanan yang ada, atau malahan mengambil keuntungan darinya.

Hubungan pemahaman keagamaan dengan sikap politik ini bila ditelusuri atas penelitian Afan Gaffar dan J. Kristiadi yang mengkaji tentang sikap politik di Indonesia dengan judul *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, dalam studinya, Gaffar menggunakan pendekatan sosio-religius dari teorinya Geertz mengenai tiga varian agama di Indonesia, yaitu santri, abangan, dan priyayi sebagai

variabel penjelas utama. Namun dalam hal ini Gaffar lebih menekankan pada varian abangan dan santri.³⁰

Dalam kesimpulannya dikatakan bahwa terdapat cara pandang dan orientasi politik yang berbeda antara komunitas abangan dan komunitas santri. Perbedaan ini menurutnya dapat dijelaskan dengan melihat pada proses sosialisasi politik di kalangan orang-orang desa adanya kecenderungan yang berbeda. Kaum santri cenderung menggunakan lembaga-lembaga Islam, sementara kaum abangan lebih suka menggunakan sarana-sarana sekuler.

J. Kristiadi melakukan studi yang sama tentang sikap pemilih dengan judul *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum 1971-1978*.³¹ Studi yang dilakukan J. Kristiadi secara khusus ingin mencari penjelasan tentang pilihan (preferensi) politik seseorang dalam suasana kehidupan politik. J. Kristiadi menggunakan pendekatan sosial-budaya sebagai upaya untuk menjelaskan sikap pemilih. Pendekatan sosial-budaya ini diperlihatkan dalam kajiannya tentang pola panutan yang bersumber pada budaya masyarakat *paternalistik*. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil studi J. Kristiadi adalah, sekalipun terjadi perubahan sosial yang cukup cepat selama kurang lebih dua dasawarsa tersebut, interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia masih *paternalistis*, terutama antara anggota dan pimpinan masyarakat. Pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, diperlakukan sebagai tokoh panutan. Di antara tokoh-tokoh panutan itu, birokrat merupakan tokoh panutan yang memiliki pengaruh paling besar. Di kota figur panutan dari kalangan birokrasi adalah pegawai negeri, dan dari kalangan agama adalah mubaligh dan guru mengaji. Sementara itu di desa adalah pamong desa, dan dari kalangan agama adalah kyai.

³⁰Afan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm.14.

³¹ J. Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*, dalam Prisma,3,Maret 1996, hlm. 74.13.

Studi yang lebih khusus tentang sikap pemilih dilakukan oleh M. Ridha Taqwa dengan judul *Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992*.³² Dikatakan lebih khusus karena Ridha menjadikan umat Islam sebagai subyek pokoknya. Ridha melihat umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki sistem bertindak dan sistem hubungan sosial yang tersusun dalam tradisi syari'ah yang bersumberkan pada al-Quran dan al-Sunnah. Karena itu umat Islam dalam menentukan sikap dan tindakannya selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Sementara itu Lekkong, yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Enrekang, diketahui juga dikenal sebagai perkampungan Islam.

Penelitian yang dilakukan Ridha menunjukkan telah terjadinya polarisasi dan perubahan sikap memilih secara drastis dalam lima kali pemilu. Pada mulanya umat Islam merupakan pendukung utama partai Islam, tetapi kemudian secara bertahap afiliasi mereka beralih kepada partai lain yang tidak berlabel Islam. Perubahan itu menurutnya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Secara internal kondisi sosial ekonomi umat memang memberi peluang intervensi atau keterlibatan pihak luar. Pada saat yang sama partai Islam tidak mampu memberi jalan keluar bagi permasalahan umat. Secara eksternal, Golkar misalnya, mulai menggunakan lembaga-lembaga keislaman dalam kampanyenya. Maka tidak salah ketika umat Islam berpaling kepada Golkar. Studi Ridha secara umum menyimpulkan bahwa sikap politik, khususnya sikap memilih, merupakan fungsi dari sikap dan atau situasi sosial, ekonomi, politik, dan kepentingan umat Islam.

Studi yang lebih khusus dilakukan pula oleh Haidar Nashir dengan judul *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*.³³ Permasalahan yang dikemukakan dalam studi Haidar adalah mengenai seberapa jauh kehadiran elit birokrasi dan elit politik mempengaruhi kekuasaan elit dalam

³² M. Ridha Taqwa, *Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992*, dalam Prisma, 3, 1996, hal. 36.14.

³³ Haidar Nashir. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah* (Yogyakarta: Terawang, 2000), hlm.vi.

kepemimpinan Muhammadiyah yang kemudian mempengaruhi polarisasi sikap politik dalam Muhammadiyah? Dan pola perilaku politik elit Muhammadiyah yang seperti apakah yang dominan dalam kenyataan sosiologis di lingkungan Muhammadiyah dan faktor-faktor apa pula yang mempengaruhinya? Kesimpulan yang diperoleh dari studi yang dilakukan Haidar menunjukkan bahwa elit Muhammadiyah di Pekajangan yang menduduki posisi formal dalam organisasi pada umumnya menunjukkan pola perilaku yang moderat dengan kecenderungan akomodasionis. Di luar pola akomodatif dijumpai pula sebagian kecil kecenderungan perilaku politik yang pragmatis dan idealis dengan tetap berada dalam semangat moderat. Tidak nampak di kalangan elit Muhammadiyah ini kecenderungan perilaku politik yang radikal dengan pola konfrontasi dan revolusioner.

Disimpulkan bahwa sikap politik umat Islam Indonesia menunjukkan adanya keinginan untuk mengembangkan paham-paham keagamaan dalam partai Islam dan partai umum yang memperhatikan budaya Islam. Hal ini dilakukan guna memperkuat Islam secara kaffah.

A. Penutup

Perkembangan pemikiran Islam sampai munculnya paham-paham keagamaan di dunia Muslim, senantiasa menarik untuk diamati. Sebab, dari perkembangan pemikiran itu dapat dilihat bagaimana corak pergerakan dan cara pandang keagamaan yang sangat memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya umat Islam. Pendidikan dan pemikiran keagamaan ikut membentuk sikap dalam berbuat dan bertindak. Masyarakat yang berafiliasi, berpendidikan dan berbudaya berupaya melakukan modernisasi kepada pemahaman baru yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang (modern). Kebutuhan akan pemahaman baru muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban. Kondisi pembaharuan diharapkan mampu menimbulkan kontak dengan hal-hal baru mulai dari budaya, bahasa, sikap, pemikiran, kebiasaan, perilaku, pendidikan, politik bahkan agama. Perilaku manusia identik dengan nuansa serta khasanah perkembangannya. Dalam hal ini khasanah yang dimaksud ada kalanya berimplikasi kepada sikap

politik yang diretas dari modernisasi pendidikan Islam dan pemahaman keagamaan.

Pemahaman keagamaan ummat Islam di Indonesia berkembang di mana didominasi oleh Mazhab Syafi'i. Dalam bermazhab umumnya ummat Islam Indonesia masih bermazhab secara tekstual atau mengikuti ungkapan-ungkapan mujtahid (bermazhab secara *qauli*), belum bermazhab secara metodologis (bermazhab secara *manhaji*), yaitu dengan cara mengikuti pola berfikir mujtahid dalam meng*istimbath* hukum atau mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.

Paham keagamaan Islam Indonesia diharapkan mampu menjembatani pemahaman yang berkembang dengan masing-masing mengungkapkan karakteristiknya. Pemahaman keagamaan sebagai hasil dari resource modernisasi pendidikan diharapkan mampu mengakomodir sikap politik ummat Islam. Sikap politik merupakan sikap setiap warga negara menyangkut bidang-bidang kehidupan yang kompleks (sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan dan politik itu sendiri). Secara psikologis pembentukan sikap politik dihadapkan pada: otoritas dogmatis, atau kebenaran yang bersifat mutlak; otoritas terarah, atau ketuntasan pengaturan; dan(3) pelembagaan otoritas, atau pepaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan.

Politik sebagai bagian dari sikap manusia bagi kalangan reformis dan modernis, menjadikan al-Quran yang telah memuat kebenaran-kebenaran yang fundamental. Kebenaran-kebenaran itu harus diaplikasikan kembali ke dalam kondisi mutakhir, sehingga corak pemikiran dapat diarahkan. Corak pemikiran kaum reformis dan modernis adalah yang dilakukan oleh kalangan tradisional. Agama memiliki tempat yang khusus dalam kehidupan manusia, dan mempengaruhi cara kehidupan para penganutnya. Corak pemikiran dan pemahaman keagamaan yang berkembang dalam diri seseorang atau komunitas keagamaan tertentu (aliran atau mazhab) akan memiliki andil pula terhadap pembentukan sikap dan perilaku para pengikutnya. Dalam batas-batas tertentu, sikap politik

seseorang atau suatu komunitas masyarakat, ternyata dapat pula dipengaruhi oleh corak dan pemahaman terhadap agamanya.

Daftar Pustaka

- Andrain, Charles F. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Argyle, Michael and Benjamin Beit-Hallahmi, *The Social Psychology of Religion*, London: Routledge & Kegan Paul, 1975.
- Asari, Hasan. *Modernisasi Islam Tokoh, Gagasan dan Gerakan Kajian Tentang Perkembangan Modern dalam Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Britain, and the United States*”, *American Journal of Sociology*, 72.
- Daulay, Haidar Putra. & Nurgaya Pasha, *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah Kajian dari Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Gaffar, Afan. *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Hasjmy, A. *Syiah dan Ahlussunnah: Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Hunter, Shireen T. *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Ibrahim Buchari, Sidi. *Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau*, Jakarta: Gunung Tiga, 1981.
- Jabali, Fuad. dan Jamhari (peny), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Kristiadi, J. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*, dalam *Prisma*, 3, Maret 1996.

Asfiati

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.

Langgulung, Hasan. *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1985.

M. Janowitz. and Segal, D.R., *Social Cleavage and Party Affiliation: Germany, Great*

Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 2013.

Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

Mormons, Social Forces, dalam Michael Argyle, *The Social Psychology*.

Mukti, Abdul. *Pembaharuan Lembaga Pendidikan di Mesir*, Bandung: Cita Pustaka, 2008.

Nashir, Haidar. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, Yogyakarta: Terawang, 2000.

Nasution, Harun. *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI Press, 1987.

..... *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

..... *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.

Qomar, Mujamil. *Fajar Baru Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 2012.

Ridha Taqwa, M. *Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992*, dalam Prisma, 3, 1996.

Rusli, Ris'an. *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sastrapratedja (ed.), *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1982.

- Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik* , Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Smith, Donald Eugene. *Agama dan Modernisasi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Stebrink, Karel. *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sudrajat, Ajat. *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam diIndonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985..